

Peran NGO sebagai Bagian dari *Civil Society* dalam Mitigasi Banjir di Praha

Kurnia Novianti

*Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta*

ABSTRACT

Successful flood mitigation performed by the Czech Republic became an important lesson for Indonesia. In contrast to the Czech's "friendly" with the flood, the public in Indonesia it is always difficult to deal with. This paper is going to map the flood mitigation conducted by elements in society. By focusing attention on the organization of non-governmental organizations, this paper suggests that cooperation between them is not always consistent, there is a difference of opinion even different activities. Background values, ideologies, and interests of different led to various responses, roles, and strategies. This paper not only explores the phenomenon of flooding in the city of Prague in particular, but also analyze the response, roles, and strategies undertaken by environmental NGOs using actor-based approach.

Keywords: *flood mitigation, NGO, society, actor-based approach, The Czech Republic.*

Mitigasi banjir yang sukses dilakukan oleh Republik Ceko menjadi satu pelajaran penting bagi Indonesia. Berbeda dengan masyarakat Ceko yang "bersahabat" dengan banjir, masyarakat Indonesia justru selalu kesulitan menghadapinya. Dalam tulisan ini dipetakan bagaimana mitigasi banjir dilakukan oleh elemen-elemen yang ada di masyarakat. Dengan memfokuskan perhatian pada nongovernmental organizations (NGOs), tulisan ini menunjukkan bahwa kerjasama di antara mereka tidak selalu sejalan, melainkan ada perbedaan pendapat aktivitas yang dilakukan. Latar belakang nilai, ideologi, dan kepentingan yang berbeda-beda memunculkan berbagai respon, peran, dan strategi. Tulisan ini tidak hanya mengeksplorasi fenomena banjir di Kota Praha khususnya, tetapi juga menganalisis respon, peran, dan strategi yang dilakukan NGO lingkungan dengan menggunakan actor-based approach.

Kata-Kata Kunci: *mitigasi banjir, NGO, masyarakat, pendekatan aktor, Republik Ceko.*

Bagi Indonesia, banjir bukanlah kata yang asing didengar. Ketika musim hujan tiba, beberapa kawasan “langganan banjir” dapat dipastikan mengalaminya. Tidak hanya kota-kota besar, daerah pedesaan pun tidak luput dari bencana ini. Namun hingga hari ini, baik pemerintah daerah maupun pusat sepertinya belum berhasil menemukan metode yang tepat untuk menanggulangnya. Banjir seolah menjadi kejadian biasa yang harus diterima begitu saja (*taken for granted*). Padahal sebagai bencana yang sudah terjadi hampir setiap tahun, banjir seharusnya bisa ditanggulangi dengan sistem (mitigasi) yang terintegrasi sehingga tidak lagi menjadi kegagalan kolektif.

Paling tidak, inilah yang dikritik oleh Eep Saefulloh Fatah, ketika menyaksikan penanganan banjir di kota Praha. Seluruh elemen, baik pemerintah kota, sejumlah polisi dan tentara, dibantu oleh masyarakat begitu cekatan membangun tanggul darurat untuk menghalangi laju air atau membelokkannya (Kompas 2007, 1-4). Secara eksplisit, penulis kemudian membandingkan hal itu dengan apa yang terjadi di negaranya sendiri. Dalam analisisnya dikatakan bahwa strategi integratif dan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat di Praha ternyata tidak terlihat dalam penanganan banjir di Indonesia. Dengan mengambil contoh kota Jakarta, penulis memandang bahwa pemerintah kota tidak cekatan dan sigap dalam menangani banjir.

Namun tulisan ini tidak bertujuan untuk membandingkan antara manajemen bencana di kedua negara. Tulisan ini lebih memfokuskan pada respon, peran, dan strategi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kaitannya dengan bencana banjir yang terjadi di Republik Ceko. Berdasarkan hasil penelitian tentang gerakan lingkungan di Republik Ceko, Novianti (2010b) menyatakan bahwa gerakan lingkungan lebih banyak bersifat konservasi dan sifat gerakan organisasi-organisasi non-pemerintah lebih bersifat lokal. Namun sisi positifnya adalah gerakan-gerakan lingkungan yang dilakukan langsung melibatkan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak).

Dalam konteks banjir yang terjadi di Praha¹, organisasi lingkungan pun melakukan pelbagai upaya sebagai respon atas bencana tersebut. Respon tersebut dimunculkan dalam beberapa aksi yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota masyarakat dan elemen pemerintahan, seperti pemerintah kota dan kepolisian setempat. Inilah yang semakin menguatkan peran organisasi lingkungan sebagai salah satu kekuatan

¹ Praha, Republik Ceko, menjadi salah satu ibukota negara di dunia yang berhasil menerapkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi. Data-data yang diperoleh dari *desk research* dan pengalaman *fieldwork* salah satu anggota tim Eropa PSDR Lipi pada tahun 2011 menjadi referensi yang digunakan.

dalam *civil society*. Dengan menggunakan pendekatan aktor (*actor approach*), tulisan ini juga mengangkat pertanyaan tentang bagaimana NGO-NGO lingkungan (sebagai aktor) menginterpretasikan bencana banjir sehingga mampu membangun komunikasi dan pemahaman diantara mereka sehingga teraktualisasi dalam aksi? Aksi yang dilakukan merupakan bagian dari strategi dan peran NGO dalam merespon bencana banjir.

Pengalaman Republik Ceko dalam Menangani Banjir

Bulan Agustus 2002, menjadi penanda terjadinya sebuah bencana alam yang cukup menyita perhatian internasional, yaitu banjir. Sebelum membahas apa dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh banjir, European Union (2009, 6) mengkategorikan beberapa tipe banjir, yaitu (1) Banjir inter (*spring*) dengan mencairnya salju, (2) Banjir es, (3) Banjir musim panas karena hujan permanen - banjir yang terjadi dengan curah hujan yang lebih intensif dalam jangka panjang; jenis ini pernah dialami Republik Ceko pada bulan Juli 1997 dan Agustus 2002. Agregat curah hujan sangat tinggi, melebihi kemampuan retensi kapasitas lembah sungai sehingga air tidak tertampung lagi. Kondisi semakin memburuk oleh perluasan wilayah hujan yang meluas, (4) Banjir deras musim panas (*flash*) - yang disebabkan oleh hujan deras. Selama puluhan menit hingga beberapa jam, curah hujan terjadi dalam area lokal yang terbatas, yang melampaui bahkan 100 mm, (5) Banjir khusus - banjir yang terjadi sehubungan dengan kecelakaan fasilitas *hydrotechnical*; ledakan kolam atau bendungan menjadi penyebab yang paling sering terjadi).

International Flood Network (2005) mencatat bahwa banjir yang dialami oleh masyarakat Republik Ceko pada bulan Agustus 2002 disebabkan oleh meluapnya sungai Elbe setelah hujan deras yang berkepanjangan. Banjir kemudian berdampak pada kerugian yang tidak hanya bersifat materil, tetapi juga korban jiwa. Paling tidak tercatat sebanyak 17 dan 20 orang meninggal di kawasan Republik Ceko dan Jerman. Sementara itu, puluhan ribu penduduk di sekitar sungai Elbe dan Vltava kehilangan tempat tinggal dan pemerintah setempat melaporkan bahwa kedua negara mengalami kerugian hingga 10 milyar Dollar (Guentzel, 2002).

Sementara itu, Flood Disaster Investigation Team to Europe (2003) dalam laporannya menyebutkan bahwa ketika banjir terjadi, tingkat air di bagian bawah kota mencapai 3-4 meter. Di dalam kota sendiri, tidak ada korban jiwa karena 50.000 orang berhasil dievakuasi sebelum banjir terjadi. Namun, di bagian lain dari Republik Ceko, sebanyak 220.000 orang juga terpaksa mengungsi dan tercatat 15 nyawa hilang.

Senada dengan laporan International Flood Network, kerusakan yang disebabkan banjir tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar Euro. Selain Republik Ceko, Jerman juga mengalami bencana serupa. Tercatat sebanyak dua kali kejadian banjir di Jerman yang disebabkan oleh formasi geologi di sekitar lembah sungai. Pertama berasal dari hujan deras yang melanda Elzgebirge hingga banjir bandang dan endapan terjadi di sepanjang sungai pada 12 Agustus. Banjir juga terjadi di sepanjang hilir Mulde dan aliran sungai. Setelah itu, yang kedua adalah banjir akibat limpahan *upper mainstream* Sungai Elbe. Hal ini menandai tingkat air Dresden mencapai rekor tertinggi (Flood Disaster Investigation Team to Europe, 2003).

Menanggulangi bencana yang menyebabkan kerugian yang amat besar tersebut, pemerintah Republik Ceko tidak hanya sigap dan cekatan ketika peristiwa terjadi, tetapi juga menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. European Union (2009, 2) mencatat bahwa pengalaman akan bencana banjir yang berulang pada tahun 1997, 2002, dan 2006 meningkatkan kepedulian sosial untuk mengimplementasikan langkah-langkah sistematis guna memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap banjir, termasuk prediksi dan layanan peringatan dari kemungkinan kualitas tertinggi. Langkah ini diwujudkan dengan disetujuinya Strategi Perlindungan terhadap Banjir (Protection Strategy against Floods) dalam Wilayah Republik Ceko oleh pemerintah pada tahun 2000. Kebijakan ini kemudian menjadi dokumen politik yang mendasar dalam perlindungan terhadap banjir.

Sementara itu, dalam The World Summit on Sustainable Development (dalam Horáková 2002) para environmentalis berpendapat bahwa banjir merupakan salah satu akibat dari pemanasan iklim global sehingga membutuhkan pendekatan terkoordinasi dalam skala global untuk menanggulanginya. Hal lain yang disebutkan adalah efek luar biasa yang dirasakan setelah banjir juga terkait dengan bentangan (*landscape*) oleh aktivitas manusia selama ratusan tahun. Oleh karena itu, isu *landscape* juga terangkat dalam diskusi mengenai banjir di Republik Ceko. Seperti dijelaskan oleh Menteri Lingkungan (The Czech Environment Minister), Libor Ambrozek, bahwa *landscape* memegang peran yang penting dalam mengantisipasi bencana alam:

We need to discuss how we shall treat our landscape from now on. None of us could have guessed that such a short time after the 1997 floods in Moravia, another wave would hit the Czech Republic in 2002. We should not forget that a natural landscape or a landscape carefully tended by men, such as the south Bohemian region of Trebon or around the confluence of the Morava and the Dyje in Moravia, was able to withhold a great amount of water and protect villages from flooding.

Selain itu, Zielinski (2005) menuliskan rekomendasi teknis tentang pentingnya data desain hidrologi untuk keamanan struktur hidrolik (bendungan dan jembatan misalnya) dan keselamatan orang, yaitu (1). Untuk melakukan tinjauan literatur singkat penelitian yang dilakukan pada data desain hidrologi untuk kejadian banjir yang ekstrim, (2). Melakukan survei internasional tentang praktek terbaik yang tersedia dan pada standar nasional dalam estimasi desain data hidrologi untuk kejadian banjir yang ekstrim, (3). Melakukan investigasi metode PMP/derivasi PMF dan metode lain untuk estimasi banjir yang ekstrim, (4). Menghubungi individu kunci atau kelompok penelitian untuk opini dan komentar *canvass* tentang prioritas penelitian di masa depan, (5). Mempersiapkan katalog banjir ekstrem yang terjadi di Kawasan (*Region*) sejak tahun 2000, dan (5). Untuk bekerja sama dan memberikan nasihat kepada para ahli dari Asosiasi yang bekerja pada iklim dan air.

Pelbagai upaya yang ditempuh untuk menanggulangi dan mengantisipasi bencana khususnya banjir, menjadi bagian dari tujuan-tujuan strategis (*strategic goals*) Republik Ceko secara umum. Hal ini diperlukan untuk mendukung kepentingan Strategi Keamanan (*The Security Strategy*).² Dalam konteks ini, terkait dengan *environmental security*, Republik Ceko berperan dalam mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencegah dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam, kondisi lingkungan yang tidak terduga, dan kecelakaan industri, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hlavacek 2006, 1).

Pemerintah Republik Ceko sendiri, seperti dilaporkan oleh NeWater (2005, 11) telah menyetujui 'Strategi menanggulangi banjir di kawasan Republik Ceko (*Strategy against floods on the territory of the Czech Republic*)' pada bulan April tahun 2000, yang aktivitasnya difokuskan pada formulasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola banjir. Karena karakteristik interval pendek antara curah hujan dan debit, kebutuhan utama manajemen banjir Republik Ceko adalah peramalan (*forecasting*)³ teknologi tinggi meteorologi dan sistem

² Pada bulan Desember 2003, Pemerintah Ceko menyetujui *Security Strategy*, salah satu dokumen dasar tentang kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri Republik Ceko. Kebijakan luar negeri Republik Ceko didasarkan pada *Government Policy Statements* pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2004, serta pada Konsep Kebijakan Luar Negeri Republik Ceko untuk 2003-2006 yang menekankan pada perkembangan hubungan bilateral dan partisipasi dalam kegiatan multilateral yang sesuai dengan standar di perlindungan lingkungan.

³ Menurut Biba, dkk (2004, 540) *a forecast service* hanya digunakan untuk situasi banjir yang ekstrem. Peramalan itu dapat diciptakan pada wilayah bagian bawah sungai-sungai *in accordance with the news on the facts how*, sementara di bagian atas air, kadarnya berubah tergantung pada curah hujan yang terjadi. Namun, solusi tersebut tidak dapat digunakan di daerah pegunungan untuk

peringatan serta tindakan pencegahan untuk keterbelakangan dan akumulasi air di daerah aliran sungai. Oleh karena itu, kegiatan dalam kebijakan termasuk instalasi perangkat baru untuk meningkatkan ramalan banjir dan realisasi stasiun pengukuran tambahan untuk curah hujan dan debit. Secara bersamaan, langkah konkret untuk memperlambat pembuangan air hujan serta perlindungan teknis kota dan desapun dikembangkan. Langkah-langkah yang diusulkan didasarkan pada dua proyek pemodelan internasional, yaitu 'Manajemen Banjir di Republik Ceko I dan II' yang didukung oleh Denmark, dan 'Perlindungan terhadap Banjir di Republik Ceko' yang didukung oleh Belanda.

Selain itu, Departemen Pertanian mulai mengimplementasikan 'Program Pencegahan terhadap Banjir (Program of Prevention against Floods)', yang fokusnya adalah pada peningkatan perlindungan daerah-daerah yang paling rawan banjir di Republik Ceko. *The basin water boards* dan the Agricultural Water Management Authority menjadi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya merealisasikan program tersebut. Tahap pertama dijadwalkan terlaksana pada tahun 2002-2005. Kemudian 'Program Penentuan Kawasan Banjir di sepanjang Jalur Air (Program for Determination of Flood Areas along the Watercourses)' dan 'Program Penilaian Run-Off Kondisi di Daerah Aliran Sungai (Program of Assessment of Run-Off Conditions in the Watersheds)' dimulai, untuk menyediakan latar belakang yang tepat dalam penyusunan proposal tentang tindakan perlindungan, perencanaan wilayah dan pembangunan daerah. Kegiatan untuk perlindungan banjir juga merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan DAS, yang sedang dipersiapkan oleh Water Framework Directive. Lebih lanjut, perlindungan banjir nasional dimasukkan ke dalam kegiatan komisi internasional untuk perlindungan sungai Eropa (misalnya ICPE) (Puncochar 2005a dalam NeWater 2005, 11-12).

Di samping strategi penanggulangan, WHO (2002, 24-25) juga merekomendasikan tiga isu penting, yaitu pendidikan yang efektif atau perubahan sikap (*the effectiveness of education/behavioural changes*), ukuran-ukuran struktural (*structural measures*), dan sistem peringatan dini (*early warning systems*). Ketiga isu tersebut tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis dari penanggulangan dan pengelolaan banjir, tetapi juga aspek sosial-budaya (termasuk di dalamnya pengetahuan) masyarakat sehingga hasil yang diharapkan tidak hanya mengurangi

terjadinya pengendapan cepat tinggi, cepat lari dari daerah tangkapan air. Daerah tangkapan tersebut tidak, dalam sebagian besar kasus, dimonitor dan pengukuran curah hujan tidak dilakukan di dalamnya. Fenomena seperti di daerah tangkapan pegunungan menjadi subyek dalam prinsip-prinsip tindakan pencegahan dengan stabilisasi sedimen berasal di tempat asal mereka dan aman membelokkan air banjir.

jumlah korban atau kerugian material namun yang lebih penting adalah kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, sistem yang dibuat akan menjadi efektif karena setiap elemen dalam masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam proses mitigasi.

Sebagai bagian dari penerapan sistem yang terintegrasi dan komprehensif dalam menanggulangi dan mengantisipasi banjir, World Meteorological Organization (2007, 22) juga merekomendasikan pentingnya keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat lokal, termasuk organisasi relawan, sektor swasta, petani, penduduk, dan lembaga lain. *Stakeholders* tersebut berperan dalam menyediakan dasar bagi penilaian (*assessment*) terhadap kerugian yang disebabkan oleh banjir, dan proses penilaian kebutuhan untuk memfasilitasi rancangan masukan (*inputs*) yang diberikan oleh para *stakeholder*. Dengan demikian, penanganan banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga elemen-elemen dalam masyarakat.

Keterlibatan NGO sebagai Salah Satu Elemen dalam Civil Society

Ketika negara Republik Ceko baru berdiri, tantangan yang dihadapi oleh NGO dalam meluncurkan gerakan lingkungan lebih banyak terkait dengan aspek politik. Artinya, pada masa itu gerakan lingkungan sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya perjuangan politis para aktivis atau personil NGO. Penelitian Shriver dan Messer (2009, 169-170) menunjukkan bahwa periode antara tahun 1989-1992 ketika Kementrian Lingkungan baru didirikan, bersamaan dengan serangkaian *environmental initiatives* oleh pemerintah transisi. Temuan mereka mengindikasikan bahwa keberhasilan awal gerakan lingkungan pasca komunis tergantung pada ekspansi dalam memanfaatkan peluang-peluang politik, termasuk pemilu bebas, akses kelembagaan birokrasi pemerintah, dan berlimpahnya sumber daya organisasi dan keuangan.

Dalam konteks politik dan ekonomi yang mendukung itulah, Shriver dan Messer menambahkan bahwa gerakan lingkungan di Republik Ceko terbentuk dan beberapa organisasi nasional mulai memperlihatkan keberhasilan dalam mengkampanyekan isu-isu energi, lalu-lintas dan transportasi, perlindungan lingkungan, dan pendidikan bagi masyarakat umum. Ditambah dengan dukungan yang semakin luas di pelbagai bagian negara terhadap kampanye yang dilakukan.

Gerakan lingkungan yang dilakukan oleh NGO kemudian menjadi bagian yang cukup signifikan dalam merespon bencana alam seperti banjir. Ketika beberapa NGO memilih mengkampanyekan pentingnya menjaga

kelestarian lingkungan, hutan misalnya, beberapa NGO yang lain justru mengambil peran sebagai fasilitator dengan cara mengajak masyarakat untuk menanam pohon secara bersama-sama (Trebecky 2002, 4). Kegiatan memobilisasi ini seperti halnya temuan dalam penelitian Carmin (2008) menunjukkan bahwa perhatian mayoritas NGO adalah pada aktivitas yang terkait dengan masyarakat dan pembentukan *civil society*. Oleh karena itu, banjir menjadi salah satu peristiwa yang mampu membangkitkan solidaritas diantara elemen masyarakat, dengan NGO sebagai institusi yang memfasilitasi.

Data dari U.S. National Science Foundation and the Czech Ministry for Education, Youth and Sport tahun 2005 menunjukkan hal yang menarik tentang beragamnya aktivitas yang dilakukan oleh beberapa NGO ketika banjir terjadi. Seperti disebutkan dalam Novianti (2010a, 107-108) bahwa NGO-NGO lingkungan di Republik Ceko memiliki karakteristik berdasarkan latar belakang pendirian organisasi, aktivitas yang dilakukan, sumber dana yang diperoleh, metode kampanye yang dilakukan, jejaring yang dihasilkan, perannya di dalam masyarakat, dan perannya di dalam proses kebijakan. Diversitas itulah yang memunculkan variasi NGO-NGO lingkungan dalam merespon banjir, seperti digambarkan berikut.

Tabel 1
Banjir dan Aktivitas yang Dilakukan NGO Lingkungan
di Republik Ceko

Nama NGO	Rutinitas Organisasi			Implementasi rutinitas dalam merespon banjir
	Target	Taktik/ Strategi	Frame	
Greenpeace	Negara	<i>Watchdog</i> Aksi langsung	Peraturan yang lemah Konsumsi yang berlebihan	Melakukan aksi langsung untuk menunjukkan bahaya akan banjir. Menawarkan untuk mengirim tenaga relawan. Publikasi dan perhatian pada media.
Arnika (<i>toxic program</i>)	Negara	<i>Watchdog</i>	Pemerintah tidak menaruh perhatian yang cukup	<i>Promoting stricter. Environmental regulations.</i> Mempertanyakan lebih lanjut tentang pembangunan bendungan dekat Sungai Labe. <i>Press release</i> dan

				publikasi tentang racun (<i>toxic</i>).
Arnika (<i>land use program</i>)	Negara	<i>Watchdog</i>	Pemerintah tidak menaruh perhatian yang cukup	Mengubah perencanaan tata guna tanah. Menciptakan inventarisasi gedung dalam <i>floodplains</i> .
Hnuti Duha	Negara	Advokasi dan lobi	<i>Robust policy</i> menjadi kritikal	Bekerja pada sektor hukum (Anti-Flood Law) sejak 2002.
CSOP (Usti)	Komunitas	<i>Local development</i>	Melindungi alam/lingkungan	Memobilisasi para relawan dengan kegiatan membersihkan.
CSOP (Troja)	Komunitas	<i>Local development/</i> Implementasi kebijakan	Melindungi alam/lingkungan dan pendidikan bagi anak muda	Memobilisasi para relawan untuk membersihkan Royal Island. Partisipasi dalam keputusan membangun bendungan. Berdiskusi dengan orang-orang pemerintahan tentang Rencana Tata Guna Lahan.
The Civic Association of Inhabitants of Neratovice	Pemerintah lokal	Memobilisasi warga bagi pembangunan daerah	Perlindungan wilayah lokal	Memobilisasi warga tentang pembangunan di <i>flood plains</i> .
The Civil Association of Malse	Pemerintah lokal	Memobilisasi warga bagi pembangunan daerah	Pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan penduduk lokal	Diskusi yang masih berjalan tentang Rencana Tata Guna Lahan dan pentingnya keterlibatan masyarakat

Sumber: U. S. National Science Foundation and the Czech Ministry for Education, Youth and Sport, 2005.

Hasil penelitian Kumar (2005) menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh NGO juga bersifat terkoordinasi. Ada tiga NGO yang menjadi subyek dalam penelitian ini, yaitu People in Need Foundation

(PINF)⁴, Adventist Development and Relief Agency (ADRA)⁵, dan The Czech Catholic Caritas (CCK)⁶ melakukan serangkaian kegiatan sebagai respon terhadap bencana yang terjadi. Ketiganya bekerja sama melalui serangkaian proses pertemuan sebelum akhirnya sepakat untuk melakukan aktivitas bantuan secara bersama-sama. Kendati demikian, peneliti mengakui bahwa aktivitas tersebut tidak dilakukan tanpa kendala.

Ketika banjir bandang terjadi di Oder-Morava pada tahun 1997, ada kebutuhan untuk membentuk sebuah sistem yang mampu untuk menanggulangi banjir dan mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2000 dibentuklah National System of Crisis Management. Sistem ini didasarkan pada dua struktur organisasi, yaitu pertama, jaringan otoritas manajemen krisis yang dibentuk oleh administrasi kantor pusat dan lainnya. Kedua, pada instrumen efektif yang menggabungkan agregasi sesuai kapasitas dan dimasukkan ke dalam sistem yang disebut Integrated Rescue System (IRS)⁷ (Pokorny dan Storek 2002 dalam Kumar 2005).

Dalam beberapa jam pertama ketika banjir datang, layanan IRS meluncurkan operasi penyelamatan besar-besaran terutama evakuasi lebih dari 210.200-215.000 orang (50.000 di Praha saja) dan penyelamatan langsung sekitar 3.374 jiwa di 42 *district*. Operasi ini melibatkan lebih dari 24.000 personil darurat dari seluruh negeri, dan berhasil mengantisipasi jumlah korban tewas akibat bencana sehingga tercatat hanya 15 orang meninggal dunia. Sementara itu, Czech humanitarian NGOs, kecuali Palang Merah (the Red Cross) yang tidak langsung terlibat dalam memberikan bantuan darurat dan operasi penyelamatan selama banjir, segera mengerahkan semua LSM utama

⁴ PINF adalah organisasi kemanusiaan yang bekerja di tingkat nasional maupun internasional, dengan fokus misi pada integrasi sosial dan pertahanan tentang hak asasi manusia. Promosi dijamin oleh televisi Ceko.

⁵ Sebuah lembaga Ceko organisasi internasional ADRA (Adventist Development and Relief Agency), didirikan pada tahun 2002, konsentrasi kiproahnya di 7 pusat relawan di seluruh negeri untuk memberikan bantuan sukarela dalam bencana alam (banjir pada tahun 2002), menjalankan rumah suaka dan beragam program-program sosial.

⁶The Czech Catholic Charity berjalan lebih dari 200 rumah amal di seluruh negara serta pusat-pusat bantuan dan ruang konsultasi. Ini adalah anggota dari badan amal Katolik internasional, Caritas Internationalis (CI).

⁷ IRS dibentuk sebagai sistem manajemen bencana terpusat yang akan memastikan kerjasama antara badan-badan seperti angkatan bersenjata, pasukan keamanan bersenjata, penyelamatan korps (petugas pemadam kebakaran, kesehatan, atau penyelamatan udara), dan kru darurat lainnya yang akan merespons situasi krisis apapun. Sistem ini terbukti menjadi instrumen efektif dalam operasi penyelamatan darurat ketika banjir 2002 melanda Republik Ceko.

yaitu PINF, CCK dan ADRA. NGO-NGO ini mengajak setiap individu melalui kampanye untuk mengumpulkan uang dan material yang dibutuhkan untuk tahap pemulihan pasca-banjir. Tujuan utama kemanusiaan mereka adalah untuk memfasilitasi kembalinya para pengungsi ke desa mereka dan mendukung rehabilitasi bangunan yang rusak akibat banjir (Kumar 2005, 46-47).

Hal lain yang dilakukan oleh NGO ketika merespon bencana seperti yang tergambar di dalam tabel 1 adalah membuka wacana tentang bahaya banjir. Greenpeace misalnya, sebagai sebuah NGO yang lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat melalui kampanye, juga menggunakan media elektronik maupun cetak untuk meluaskan wacana tentang banjir. Isu tentang banjir kemudian juga dikaitkan dengan isu yang lebih besar seperti perubahan iklim (*climate change*). Seperti hasil wawancara penulis dengan Lucie Jakesova ketika berkunjung ke kantor Greenpeace CZ di Praha tahun 2010 lalu.

Climate change is invisible problems in terms of causes impacts. But they are some where else and in here floods... I don't believe that Czech floods would be connected with the climate change but the way of the weather having could be but it wouldn't be really according the science when I say that. Like you see this winter there is no snow and there is evidence of climate change (Interview on May, 2010).

Sementara NGO lain seperti Arnika lebih mengarahkan kritiknya kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, terutama masalah pembangunan bendungan dan perencanaan tata guna tanah (*land-use planning*). Isu yang diangkat biasanya spesifik dan peran yang dimainkan sesuai dengan kerangka berpikir (*framework*) dan ideologi organisasi sebagai pengkritik pemerintah. Dengan demikian, NGO berperan sebagai pihak yang menyuarakan kehendak dan pandangan masyarakat yang marjinal atau minoritas. Ia bertindak dengan kemampuan representatifnya melakukan berbagai taktik atau strategi seperti melobi (*lobbying*), melalui pengadilan (*litigation*), protes, atau negosiasi untuk melanjutkan perjuangan konstituen mereka dalam proses kebijakan yang dirumuskan (Carmin 2010, 185-186; Princen dan Finger 1994, 34). Melihat *frame* yang digunakan, Arnika termasuk ke dalam kategori NGO yang berada di sisi seberang pemerintah, artinya perannya lebih banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Ada pula strategi dengan cara memobilisasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi yang berubah akibat banjir sekaligus melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk membahas rencana tata guna lahan (*land-use planning*), seperti yang dilakukan oleh CSOP dan The Civil Association of Malse. Di satu sisi, NGO ini memainkan peran sebagai pembangun kesadaran masyarakat sehingga mau berpartisipasi,

tetapi di sisi lain ia berperan sebagai fasilitator menjembatani pemerintah dan masyarakat. Ia tidak akan mengambil posisi di parlemen misalnya, tetapi mencoba memengaruhi rumusan kebijakan (Blowers dan Glasbergen 2003, 37) melalui lobi, konsultasi, dan saran atau masukan kepada pemerintah. Heins (2008, 69) menyebutnya sebagai institusi yang “komunikatif” dan “regulatif”. Sifat gerakan NGO kategori ini cenderung lebih *moderate* dibandingkan NGO seperti Arnika yang secara jelas sekali mengkritik setiap kebijakan pemerintah.

Sifat sebagai kelompok *ecologist* maupun *conservationist*⁸ memposisikan NGO lingkungan sebagai agen perubahan dalam masyarakat melalui beberapa aksi (*actions*) yang dilakukan, baik yang bersifat sosial maupun politik. Secara sosial, organisasi lingkungan berperan sebagai *actor* dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada publik mengenai pentingnya memelihara kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijaksana memanfaatkan lingkungan menjadi tujuan.

Sedangkan secara politik, gerakan lingkungan dilakukan untuk mengubah paradigma pemerintah yang cenderung lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi dengan mengenyampingkan aspek lingkungan. Tidak sedikit infrastruktur dibangun tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap lingkungan. Akibatnya kualitas lingkungan menurun bahkan mengalami kerusakan parah setelah terakumulasi selama bertahun-tahun (Novianti 2010a, 45). Dalam analisis penulis, pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan isu banjir terutama ketika *land-use planning* dan pembangunan bendungan (*dam*) dipertanyakan oleh beberapa NGO. Masih berupa rumusan maupun telah diimplementasikan, kedua hal tersebut menjadi wacana yang dirasakan perlu untuk diangkat sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Selain banjir yang terjadi tahun 2002, pengalaman merasakan banjir yang frekuensinya cukup tinggi dalam sepuluh tahun terakhir—tidak hanya di Republik Ceko, tetapi juga di beberapa kawasan di Eropa—melatarbelakangi salah satu NGO bernama Regional Environmental

⁸ *Ecologist group* lebih terfokus pada isu-isu lingkungan dalam masyarakat industri maju dan melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam hubungan masyarakat dan politik dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut (misalnya penolakan terhadap nuklir atau adopsi terhadap standar lingkungan yang berkelanjutan/*sustainable environmental standard*). Sedangkan *conservation group* lebih memperhatikan masalah perlindungan makhluk hidup/*wildlife* dan isu-isu pemeliharaan/*presevation* tanpa melakukan *action* yang melawan kekuasaan dominan di dalam negara untuk mencapai mencapai tujuannya (Dalton 2003, 758-759).

Center Czech Republic (REC CZ) secara khusus merumuskan sebuah program. Program yang diberi nama Flood Defense System ini diimplementasikan pada tanggal 1 November 2009. Hasil wawancara (Mei 2011) menunjukkan bahwa REC menghubungkan antara bencana banjir dan perubahan iklim. Beberapa strategi yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi dampak buruk akibat banjir terutama di kawasan perkotaan (*urban areas*). Sementara tujuan jangka panjangnya adalah mengembangkan teknologi, metode, konsep dan alat untuk tujuan penilaian dan adaptasi bangunan baru dan yang sudah ada serta infrastruktur.

NGO lain yang juga merespon banjir 2009 adalah Palang Merah dan Sabit Merah Republik Ceko (Red Cross dan Red Crescent Czech Republic). Aksi yang dilakukan organisasi ini adalah memonitor laporan yang datang dari kantor Badan Metrologi Pusat melalui cabang-cabang Palang Merah di daerah yang terkena banjir dan diperbarui setiap 30 menit. Saat hujan turun dengan cepat, tidak ada *advance warning* untuk mempersiapkan. Cabang Palang Merah di tingkat lokal mulai mempersiapkan segala kebutuhan masyarakat, terutama air atau akomodasi, meskipun sering tidak diperlukan karena orang lebih suka hidup dengan teman-teman atau kerabat (Laporan DREF Operation Update: Floods in The Czech Republic 2009).

Sementara itu, unit darurat utama dari Palang Merah Ceko segera menyiapkan pertolongan pertama, memberikan saran dan memantau operasi bantuan. Sekitar 500 relawan dan staf dilibatkan dalam kegiatan ini dan salah satu prioritas yang diidentifikasi di awal, setelah berkonsultasi dengan pihak berwenang dan masyarakat yang terkena dampak adalah membersihkan sumur yang digunakan oleh rumah tangga sebagai satu-satunya sumber air minum. Akibat banjir, sumur terkontaminasi sehingga akses dan ketersediaan air minum bagi masyarakat menjadi terganggu. Untuk itu, Palang Merah Ceko menyerukan dukungan kepada Federasi Internasional untuk membantu mereka dalam menyusun rencana tindakan dan sarana keuangan untuk membersihkan sekitar 1.000 sumur di daerah yang paling buruk terkena dampak banjir. Dengan demikian, pasokan air minum ke sekitar 5.000 jiwa dapat diperoleh kembali (Laporan DREF Operation Update: Floods in The Czech Republic 2009).

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh NGO yang melibatkan individu maupun institusi dalam jejaring yang sangat luas yang diaktualisasikan dalam tindakan kolektif dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi lingkungan, menjadi sebuah gerakan lingkungan menurut Rootes (1999, 2 dalam Fagan 2004, 25). Ada pengetahuan yang digunakan, dibagi, dan dimodifikasi dalam setiap kegiatan tersebut. Seperti banjir, yang memungkinkan sebuah NGO

untuk memobilisasi masyarakat untuk melakukan sesuatu, atau membuka wacana tentang perubahan iklim yang mengglobal, atau mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan atas kebijakan-kebijakan tertentu.

Tentu saja, sebuah NGO tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Perlu dibangun hubungan dengan NGO-NGO lainnya sehingga jejaring (*networking*) terbentuk. Pelbagai diskusi dalam bentuk seminar, workshop, atau pelatihan dapat menjadi wadah bagi para aktivis untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Kegiatan ini pun menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kemampuan NGO dalam menjalankan segala perannya. Bahkan dikatakan oleh Fagan (2004, 25) para aktivis mungkin akan terlibat atau memiliki hubungan dengan lebih dari satu organisasi dan dapat aktif dalam kampanye-kampanye gerakan sosial yang lain. Hubungan antarkelompok dan organisasi cenderung bersifat cair dan informal.

Jejaring yang dibentuk inipun akan memberikan manfaat bagi individu-individu dalam NGO. Informasi akan lebih cepat tersebar sehingga masing-masing dari mereka dapat secara sigap dan cekatan dalam merespon sesuatu, seperti banjir. Dengan koordinasi dan kerja sama baik dengan masyarakat maupun elemen pemerintah, sesungguhnya NGO telah memainkan perannya sebagai relawan. Meskipun tidak semua teraktualisasi dengan cara yang sama, tetapi peran ini menjadi aksi nyata di samping tiga peran utama yang selama ini teramati oleh para peneliti/pemerhati NGO, yaitu sebagai institusi yang memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat (terutama anak-anak muda), meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang isu-isu lingkungan, dan melakukan kampanye.

Analisis Kasus

Dalam konteks banjir yang terjadi di Ceko, penulis menempatkan aktor sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan banjir, baik institusi maupun individu, sehingga NGO bukanlah satu-satunya aktor karena ada pula pihak pemerintah dan angkatan bersenjata, serta anggota masyarakat (baik sebagai korban maupun relawan) yang berkontribusi dalam upaya tersebut.

Dalam tulisan Mosse (2005, 2), konteks yang diangkat adalah pembangunan pertanian di India yang pada kenyataannya direncanakan oleh orang-orang Barat (Inggris) dan proses perencanaan kebijakan (*policy*) yang akan digunakan dalam pembangunan dilakukan di Inggris dan bukan di negara yang akan dibangun. Namun yang lebih

memprihatinkan adalah dalam merencanakan kebijakan tersebut, sama sekali tidak melibatkan warga masyarakat yang akan dibangun. Mereka diposisikan sebagai obyek dari pembangunan, yang dianggap bermasalah dan akan memperoleh penyelesaian masalah dari para “dewa” pembangunan yaitu para konsultan asing yang terdiri dari orang-orang terpelajar yang memiliki segudang pengalaman dalam membangun sebuah masyarakat. Dari sini, muncul isu kekuasaan antara pihak perencana pembangunan dan masyarakat yang hanya menjadi obyek (pihak yang hanya pasif menerima).

Meskipun kasus yang menjadi perhatian Mosse (2005) berbeda dengan konteks banjir yang menjadi fokus dalam tulisan ini, tetapi pendekatan aktor diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana NGO-NGO lingkungan (sebagai aktor) menginterpretasikan bencana banjir sehingga mampu membangun komunikasi dan pemahaman diantara mereka sehingga teraktualisasi dalam aksi. Seperti telah disebutkan bahwa tentu saja NGO bukanlah satu-satunya aktor dalam kasus ini dan tindakan yang dimunculkan sebagai respon terhadap banjir juga cukup beragam, mulai dari aksi langsung hingga pendekatan kepada pembuat kebijakan.

Apabila perhatian Mosse (2005) adalah pada kebijakan dan interpretasi para aktor terhadap kebijakan dalam pembangunan di India, maka di dalam tulisan ini banjir menjadi sebuah peristiwa (*event*) yang perlu diinterpretasikan oleh para aktor sebelum mereka melakukan aksi sebagai respon terhadap banjir. Dalam beberapa laporan disebutkan bahwa ketika banjir melanda Ceko, tidak hanya pada tahun 2002, kekuatan-kekuatan yang terdiri dari pemerintah dan elemen-elemen masyarakat termasuk NGO dan relawan, turun langsung untuk melakukan sesuatu.

Beberapa NGO misalnya, menggunakan jejaring yang dimilikinya baik dengan sesama NGO maupun dengan bantuan para donor dan relawan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam proses membangun koordinasi ini, pengamatan Kumar (2005) terhadap ketiga NGO yang ditelitinya -PINF, CCK dan ADRA- mengarahkan pada analisis tentang dinamika hubungan antaraktor yang terlibat dalam rencana pemberian bantuan terhadap korban banjir. Ia mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan argumentasi, meskipun pada akhirnya mereka melakukan kegiatan bersama-sama.

Bagi penulis, sangat menarik untuk menajamkan analisis bahwa meskipun terjadi fragmentasi dan ketidaksepakatan, para aktor dalam konteks tersebut secara konstan saling terikat (*constantly engaged*) dalam menciptakan keteraturan (*order*) dan kesatuan (*unity*) melalui

tindakan-tindakan tertentu (Mosse 2005, 9). Penulis berasumsi bahwa masing-masing pihak mungkin saja mengemukakan hal-hal yang berbeda satu sama lain tentang rencana pemberian bantuan—karena adanya kepentingan—tetapi demi *order* dan *unity* yang sama-sama ingin diwujudkan, maka perlu adanya kolaborasi dan kompromi diantara mereka.

Aktor begitu kuat memegang peran dalam menginterpretasi hingga meluaskan ide, kepentingan, dan tujuan dari tindakan yang dilakukan. Bahkan ketika adanya NGO-NGO yang memilih “jalur tidak langsung” dalam merespon banjir, antara lain dengan cara melakukan pendekatan dengan pemerintah untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan tertentu atau melakukan kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat, menjadi pilihan yang rasional. Bagaimanapun, setiap NGO memiliki ideologi dan nilai yang berbeda-beda sehingga aksi yang dilakukannya akan selalu berpedoman pada hal-hal tersebut.

Hubungan yang dibangun dengan aktor lain pun tidak selalu bersifat positif. Seperti NGO yang memposisikan diri sebagai oposan atau kritikus pemerintah. Ada kepentingan berbeda yang hendak “disuarakan” oleh NGO, yang sangat berbeda pula dengan NGO-NGO lain yang sejalan dengan pemerintah. Ada semacam fleksibilitas yang memungkinkan para aktor yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dapat ‘berkomunikasi’ satu sama lain karena menginterpretasi dengan cara yang sama. Sementara aktor-aktor yang lain, akan menginterpretasikan dengan cara yang berbeda dengan kelompok lainnya, meskipun memahami bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menanggulangi banjir.

Dengan demikian, dalam hubungan yang terjalin antara para aktor, segala bentuk ide, pengetahuan, kepentingan, dan tujuan akan mengarah pada kekuasaan (*power*) untuk teraktualisasi dalam tindakan-tindakan tertentu. Dalam hal ini, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau pemerintah karena melalui kampanye atau protes yang ditujukan kepada pemerintah (pembuat kebijakan) menunjukkan bahwa kekuasaan melekat pada aktor tertentu (NGO). Kekuasaan juga terlihat ketika sebuah NGO memutuskan untuk memberikan bantuannya tanpa berkoordinasi dengan NGO yang lain tetapi dengan para relawan; atau pada NGO yang memilih memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur hukum atau advokasi, dan bukan aksi langsung membantu korban banjir.

Bagaimanapun bentuk kekuasaan itu diwujudkan, segala aktivitas yang dilakukan NGO dengan bantuan para relawan, bekerja sama dengan NGO-NGO yang lain, atau berkoordinasi dengan pemerintah menunjukkan bahwa NGO memiliki peran yang cukup krusial dalam

masyarakat. Ketika terjadi banjir di Ceko, peran ini kemudian diaktifkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga penanggulangannya dapat dilakukan dengan sigap dan cekatan.

Kesimpulan

Respon, peran, dan strategi yang dilakukan oleh NGO dalam menangani banjir tahun 2002 menjadi fokus dalam tulisan ini. Topik ini menarik karena Republik Ceko termasuk salah satu negara Eropa yang “cukup bersahabat” dengan banjir. Frekuensi banjir yang cukup tinggi dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Ceko untuk mempelajari dan mengevaluasi segala bentuk strategi dalam menanggulangi banjir.

Sebagai salah satu elemen dalam masyarakat, NGO memiliki peran yang cukup penting, seperti memberikan pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat, menjadi pendamping masyarakat, dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Peran-peran tersebut tentu saja terkait dengan nilai ideologis dan kepentingan yang dimiliki oleh NGO. Melalui aktivitas-aktivitas seperti kampanye, lobi, penyuluhan, pelatihan, dan lain-lain, NGO tidak hanya menyebarkan informasi tentang isu-isu yang menyangkut kehidupan masyarakat, tetapi juga mengupayakan tercapainya solusi atas sebuah permasalahan.

Banjir menjadi satu peristiwa yang cukup efektif mengaktifkan kesadaran akan solidaritas. Kendati dalam beberapa literatur digambarkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh NGO sangat beraneka ragam, tetapi semua mengarah pada satu tujuan perbaikan kondisi Ceko. Meskipun demikian, pendekatan aktor menunjukkan bahwa masing-masing pihak (aktor) berupaya menunjukkan kontribusinya melalui pelbagai aktivitas yang didasari oleh perbedaan kepentingan bahkan ideologi. Sekalipun beberapa NGO dan elemen lain bekerja sama dalam sebuah aktivitas, perdebatan atau perbedaan pendapat menjadi bagian di dalamnya dan ini menunjukkan adanya dinamika dalam relasi antaraktor.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing aktor tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan nilai ideologis yang dimilikinya. Sifat bantuan yang diberikan pun beraneka ragam, ada yang jangka pendek dan *accidental*, ada pula yang jangka panjang. Seperti halnya beberapa NGO lingkungan yang dideskripsikan dalam narasi di atas, memilih strategi yang berbeda-beda karena kerangka pikir (*frame*) yang melatarbelakanginya berbeda-beda pula. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktor –tidak hanya NGO, tetapi juga pemerintah dan elemen-elemen lain dalam masyarakat- tidak steril dari nilai-nilai tertentu dalam menentukan praksis yang dilakukannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Atkinson, Jeffrey dan Martin Scurrah, 2009. *Globalizing Social Justice: The Role of Non-Government Organizations in Bringing about Social Change*. London: Palgrave Macmillan.
- Blowers, Andrew dan Pieter Glasbergen, 2003. *Environmental Policy in an International Context: Prospects for Environmental Change*. Oxford: Elsevier Ltd.
- Fagan, Adam, 2004. *Environment and Democracy in the Czech Republic: the Environmental Movement in the Transition Process*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Heins, Volker, 2008. *Non-governmental Organizations in International Society: Struggles Over Recognition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mosse, David, 2005. *Cultivating Development: an Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- Novianti, Kurnia, 2010a. *Environmental Movement Organizations in The Czech Republic*. Jakarta: LIPI Press.
- Princen, Thomas dan Matthias Finger, 1994. *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*. New York: Routledge.

Jurnal

- Biba, M., et.al., 2004. "Forestry, mountain catchments and floods in the Czech Republic". *Journal of Forest Science*, (11): 538-541. Prague.
- Carmin, JoAnn, 2010. "NGO Capacity and Environmental Governance in Central and Eastern Europe". *Acta Politica*, (45): 183-202. Cambridge: Macmillan Publishers Ltd.
- Dalton, Russell J., dan Robert Rohrschneider, 2003. "The Environmental Movement and The Modes of Political Action". *Comparative Political Studies*, X (XX). USA: Sage Publications.
- Davis, Steven M, 2004. "Building a Movement from Scratch: Environmental Groups in the Czech Republic". *The Social Science Journal*, (41): 375-392. [online]. dalam www.sciencedirect.com.
- Novianti, Kurnia, 2010b. "Environmental Movement di Republik Ceko: Dinamika Tantangan yang Dihadapi NGO Lingkungan Pasca Revolusi Velvet". *Global & Strategies*, Januari-Juni, 4 (1): 29-49. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Shriver, Thomas E. dan Chris Messer, 2009. "Ideological Cleavages and Schism in the Czech Environmental Movement". *Human Ecology Review*, 16 (2): 161-171.

Turnock, David, 2001, "Environmental Problems and Policies in East Central Europe: A Changing Agenda", *GeoJournal*, **54**: 485–505. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Koran

Fatah, Eep Saefullah, 2007. "Bersahabat dengan Banjir". Kompas, 6 Februari, halaman 8 kolom 1-4.

Artikel Online

Guentzel, Meiling, 2002. *Record-Breaking Floods in Europe*. [online]. dalam <http://cool.conservation-us.org/borg/abbey/an/an26/an26-2/an26-202.html>. [diakses tanggal 20 Oktober 2011].
International Flood Network, 2005. *Flood Devastation Increasing*. [online]. dalam <http://www.internationalfloodnetwork.org>.

Laporan Penelitian

Heinrich, Volkhart Finn dan Lorenzo Fioramonti, 2007. *How Civil Society Influences Policy: A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe*. CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation. Research Report commissioned by: Research and Policy in Development (RAPID) dan Overseas Development Institute (ODI).

NeWater, 2005. *Transboundary River Basin Management Regimes: The Elbe Basin Case Study*. Report of the NeWater project -New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty. Delft: Delft University of Technology.

Organization for Economic Co-operation and Development, 2005. OECD Environmental Performance Reviews: The Czech Republic.

Risk Management Solutions, 2003. *Central Europe Flooding, August 2002*. Event Report.

The International Federation's Disaster Relief Emergency Fund, 2009. *Czech Republic: Flood*. DREF Operation Update.

World Health Organization, 2002. *Floods: Climate Change and Adaptation Strategies for Human Health*. Report on WHO Regional Officer for Europe Meeting. London.

World Meteorological Organization, 2007. *Conducting Flood Loss Assessments: A Tool for Integrated Flood Management*. Associated Programme on Flood Management.

NN, 2002. Photos of the 2002 flood in Europe Vltava River in the Czech Republic (a tributary of the Elbe). Photographed on September 2002.

Publikasi Resmi Pemerintah

European Union, 2009. *Protection Against Floods: Concept of Anti-Flood Measures in Central Bohemian Region*. European Regional Development Fund.

Hlavacek, Jiri, 2006. *Profile of the Czech Republic*. Inventory of Environment and Security Policies and Practices.

Makalah Seminar

Trebicky, Viktor, 2002. *Country Report: Czech Republic from an NGO Perspective*, Presentation on Regional Workshop on Capacity-Building in Governance and Public Administration for Sustainable Development Thessaloniki, 29-31 July 2002. Prague: Institute for Environmental Policy.

U. S. National Science Foundation and the Czech Ministry for Education, Youth and Sport, 2005. *Environmental Policy and Planning in the Czech Republic: Learning from the 2002 Floods*. Presentation at the Center for Slavic, Eurasian, and the East European.

Zielinski, B. Ozga, 2005. *Potential Extreme Flood*. Report of the Rapporteur on Extreme Potential Floods. Tenth Session of the RA VI Working Group on Hydrology at Pruhonice, Czech Republic, 4 to 7 May.

Laporan Tahunan

Flood Disaster Investigation Team to Europe, 2003. *Year 2002 Flood Disaster Investigation in Europe*. Summary Report.